

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dari Media



BPK Perwakilan
Provinsi Gorontalo

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tahun

2	0	2	0
---	---	---	---

Harian Umum

Online

Provinsi/Kabupaten Boalemo

Ada Temuan. Seluruh OPD Diminta Serius



HINGGA malam ketiga, pembahasan terus dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) LHP dan LPJ, bersama pemerintah daerah. (F. SETIAPAI)

Diberikan Batas Waktu Penyelesaian Pensus Diharapkan Selesai

Modelom, GP- Hampir seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Boalemo ada temuan. Hal tersebut sebagaimana hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Gorontalo beberapa waktu yang lalu. Ketua Pensus LHP, Sandi Taliki kepada Gorontalo Post menjelaskan, ada banyak rekomendasi dari **LHP BPK RI Gorontalo** dan hampir semua OPD ada temuannya. Oleh karena itu, pembahasan yang dilakukan oleh Pensus, turut melibatkan seluruh OPD.

"Masing-masing OPD memiliki tanggungjawab dalam menyelesaikan berbagai temuan BPK RI Perwakilan Gorontalo.

"Masing-masing OPD memiliki tanggungjawab dalam menyelesaikan berbagai temuan BPK RI Perwakilan Gorontalo.

Salah satunya yakni untuk Dinas Perkim. Tentunya hal ini yang harus diharapkan agar bisa diseriuseri untuk dapat ditindaklanjuti serta diselesaikan oleh OPD," terangnya. Lanjut kata politisi PDI Perjuangan Boalemo ini, pihaknya memberikan batas penyelesaian berbagai temuan atau reko mendasi LHP tersebut. Meski demikian, penyelesaiannya itu tidak serentak. Artinya masing-masing OPD mendapat batas waktu penyelesaian sesuai dengan tingkat kesulitan dalam menyelesaikan tanggungjawab mereka. Ada yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu satu minggu dan bahkan ada yang satu bulan lamanya.

"kalau ada yang tidak mengindahkan hal ini, maka tentu akan kami tindaklanjuti serta kami seriusi, sehingga bisa segera selesai dan tuntas sebagaimana harapan kita bersama," tegasnya.

Ditambahkannya pula, pihaknya berharap agar hal ini bisa menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya masing-masing OPD sehingga tidak akan terulang kembali dikemudian hari. "Kami pun akan turut memantau serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah, sebagaimana tugas pokok serta fungsi kami di DPRD. Pada dasarnya, kami berupaya semaksimal mungkin agar pembahasan bisa selesai tepat pada waktunya dan untuk hasil pembahasan, akan kami sampaikan secara terperinci pada saat paripurna nanti," pungkasnya. (kif)